

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Artinya Daerah diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi daerah.

Dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Daerah terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat dan atau kepada instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dan atau desa dari pemerintahan Provinsi

kepada Kabupaten/ kota dan atau Desa serta dari pemerintahan Kabupaten/ kota kepada Desa melaksanakan tugas tertentu.¹

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sistem informasi pemerintah Daerah yang terintegrasi secara Nasional. Perencanaan pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Daerah di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat.²

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasar pada akuntabilitas pemerintahan, diperlukan adanya dukungan informasi pengelolaan keuangan daerah. informasi keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti Dana perimbangan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi

¹ Supriatnoko.2005. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Penaku.hal202

²ibid.

keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan mobilisasi dana, menentukan arah, tujuan dan penggunaan anggaran.³

Di sisi lain tuntutan reformasi birokrasi yang mewajibkan kepada Pemerintah selaku penyelenggara administrasi keuangan, baik Daerah maupun Pusat untuk mempertanggungjawabkan seluruh hasil dari pembangunan. Seperti diketahui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sumber pendanaanya berasal dari APBN yang sebagian besar bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu Bentuk tanggungjawab dari pemerintah salah satunya adalah menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat serta penggunaan dan aksesnya dapat dilakukan secara masal, hal ini dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang akuntabel, dan fleksibel menyikapi suatu perubahan yang terjadi.

Untuk memenuhi terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan dibidang teknologi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sebagai sarana pelayanan penyaluran informasi keuangan kepada masyarakat luas. Pemerintah dipandang perlu mengembangkan sistem informasi keuangan daerah sebagai

³UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

sarana penguatan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai aturan dan undang-undang.

Desentralisasi atau pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus pemerintahan internal Daerah, Misi utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya dengan adanya semangat desentralisasi, menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan berbasis teknologi informasi.⁴

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digulirkan Kemendagri dan Kemenkeu dengan berdasar pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. SIPKD merupakan sistem informasi yang didalamnya memuat proses Perencanaan APBD sampai ketahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan beserta

⁴Supriatnoko.2005.op.cit.hal 205

pencatatan kode rekeningnya.⁵ Proses penyusunan tersebut dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di daerah beserta program dan kegiatannya, program dan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra Rencana Kerja Dan Anggaran bagi setiap SKPD. Rencana kerja nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga rancangan tersebut disusun menjadi APBD.

Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang otoriter dan setralistik menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.⁶

Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :

⁵Dasar hukum SIPKD, diambil dari id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_informasi_pengelolaan_keuangan Tanggal 10 oktober 2014 jam 19.30 WIB

⁶ Alasan Penerapan E-government Kementerian Komunikasi dan Informasi, diambil dari <https://fitriaokta.staff.gunadarma.ac.id/FE-GOVERNMENT>. Tanggal 23 April 2015 jam 08.30

- a. masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif;
- b. masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui pengembangan penganggaran melalui e-goverment, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan cara:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi.
- b. membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.⁷

Salah satu Pemerintahan di Indonesia yang sudah menerapkan E-government adalah Kota Yogyakarta, salah satu aksi nyata dengan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD sendiri dilaksanakan di lingkungan PEMKOT Yogyakarta sejak akhir

⁷ Ibid.

tahun 2008, pada 2013 PEMKOT Yogyakarta merupakan salah satu dari 171 Daerah yang sudah menerapkan SIPKD sebagai pelaksanaan program Pilot Project Pemerintah Pusat. SIPKD merupakan sistem yang dibangun menggunakan konsep ERP (enterprise resource planning), yang mengintegrasikan data base pemerintah Kabupaten/Kota dengan data base Pemerintah Provinsi, baik secara online atau offline. SIPKD sendiri diterapkan di lingkungan PEMKOT Yogyakarta bertujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, akurat serta manajemen akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan, beberapa permasalahan masih dirasakan oleh para pengguna SIPKD. Perubahan cara kerja dari sistem manual menjadi sistem yang berbasis pada teknologi informasi membuat para petugas tidak mudah melakukan koreksi jika terjadi kesalahan. Lamanya penanganan permasalahan yang timbul dari sistem merupakan permasalahan lain yang dihadapi pengguna SIPKD. Permasalahan dengan output/hasil SIPKD dirasakan masih ada yang kurang untuk mendukung bentuk pelaporan kegiatan diluar anggaran, sehingga masih dilakukan penyesuaian secara manual. Dari semua keluhan akibat permasalahan yang muncul, diduga disebabkan oleh penerapan SIPKD yang kurang sesuai dengan harapan penggunanya.⁸

Di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta, seluruh SKPD sudah menerapkan Aplikasi SIPKD. Dari DPDPK sebagai Admin Pusat sampai tingkat kecamatan. Dari keseluruhan SKPD di Lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta DPDPK dan Bappeda adalah SKPD yang terekspos sudah baik dalam

⁸ Thesis.Agnatius Novianto.Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pemerintahan Kota Yogyakarta.ETD UGM.

menjalankan SIPKDnya, sehingga penelitian akan difokuskan di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, alasan dipilihnya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebagai studi penelitian adalah sebagai salah satu SKPD non Keuangan di Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban belum banyak terekspos dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. hal tersebut dibuktikan dengan tidak banyak masyarakat awam yang mengetahui bahwa Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta juga memiliki tugas untuk menyusun RKA dan pengelolaan keuangan lainnya, persepsi masyarakat luas bahwa pengelolaan keuangan Daerah hanya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan seperti DPDPK.

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang menerapkan Sistem penganggarannya melalui Aplikasi SIPKD, dimulai dari Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sampai pada tahapan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Terlepas masih adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIPKD, seperti perubahan cara kerja dari sistem manual ke sistem teknologi Komputer, persepsi SDM yang tidak sesuai output serta keterbatasan server, diharapkan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dapat menjadi alat bantu untuk mengatur keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam Perencanaan anggaran sampai tahap pertanggungjawaban, serta mampu menunjukkan keuangan Daerah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat secara

ekonomis, efisien, efektif, dan bertanggung jawab sehingga dapat melahirkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif di Kota Yogyakarta.

SIPKD sendiri memiliki modul Core System yang merupakan aplikasi inti, terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah system baik online maupun offline. Dalam modul Penganggaran, aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran, dimulai dengan peyiapan KUA dan PPAS. Modul ini memberikan fasilitas penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, yang akan digunakan dalam proses penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Modul ini dikembangkan dengan beberapa pengelompokan tahapan yang menggambarkan tahapan-tahapan penyusunan APBD, yaitu Pembahasan KUA dan PPAS, penyusunan serta pengesahan rancangan peraturan Daerah tentang APBD, dan Penetapan APBD sebagai tahapan terakhir yang kemudian menjadi sumber data untuk penyiapan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.⁹

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, merupakan subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, pelaksanaan SIPKD yang terencana dan terukur dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam

⁹Modul core system, diambil dari Usadi.co.id. tanggal 10 oktober 2014 jam 19.45 WIB

Mewujudkan reformasi birokrasi khususnya pada aspek pengelolaan keuangan, serta diharapkan akan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kota Yogyakarta Khususnya Di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, baik dari segi perencanaan, partisipasi, peraturan, ketanggapan, adanya keputusan bersama, keadilan, efektif dan efisiensi dan keterbukaan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal sehingga terciptanya Perencanaan Anggaran yang baik Di Kota Yogyakarta.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul:” **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014**” (Studi kasus di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun Rumusan Masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan ilmu dari penulis mengenai ilmu ekonomi, administrasi negara dan ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - b. Menghubungkan teori-teori dalam perkuliahan untuk diterapkan langsung di praktek lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

E. KERANGKA TEORI

Untuk menjelaskan secara ilmiah berbagai fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Diperlukan kerangka teori yang merupakan tolok untuk berfikir yang dapat memberikan fondasi dan pedoman yang bersifat teoritis. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya atau hubungan dengan masalah merupakan hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah. Maka pada awal Bab ini akan diuraikan mengenai Implementasi Kebijakan.

1. Implementasi Kebijakan

kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada konsep implementasi kebijakan yang merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Adapun model-model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Model Van Metter dan Carl Van Horn

Pengertian Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Carl Van Horn dalam Wahab, yaitu sebagai berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.¹⁰

¹⁰Abdul Wahab, Solichin . Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.2001.hal.65

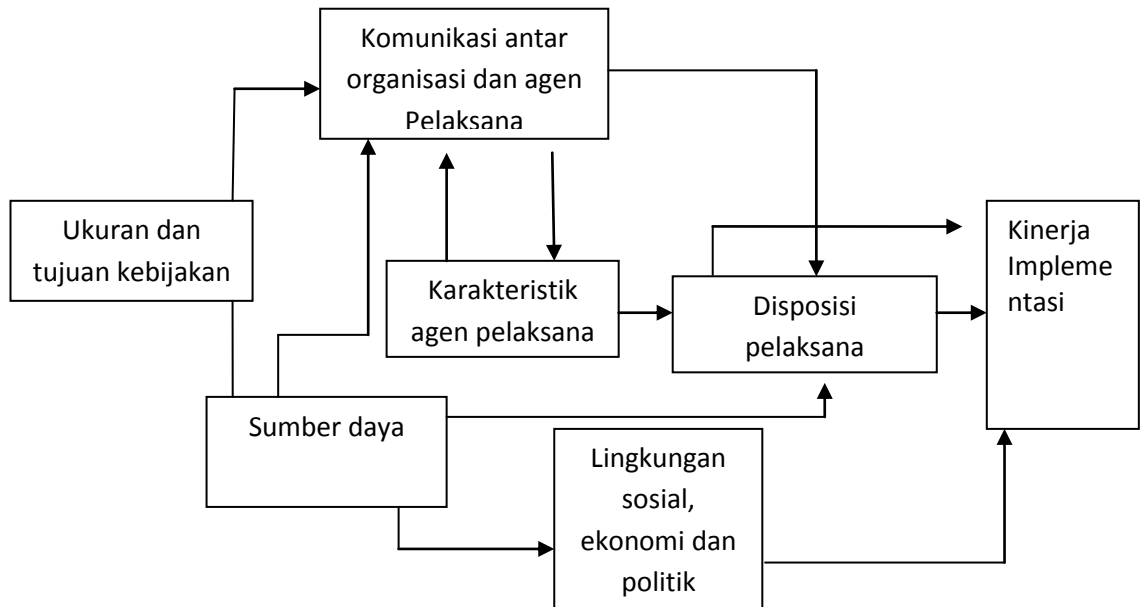
Dalam model Van Meter dengan Carl Van Horn, mengedepankan lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme artinya ada mekanisme paksa dalam pelaksanaannya, adapun beberapa Variable yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Donald dan Metter :¹¹

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources)
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki

¹¹Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 99

oleh implementor. Lebih jelasnya dijelaskan pada gambar berikut ini:¹²

Gambar 1.1 Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)

b. Model Grindle

Menurut Grindle dalam Samodra Wibawa, menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek

¹²Ibid.

individu dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Tetapi hal ini sering tidak berjalan mulus, tergantung pada kemampuan pelaksanaan program yang dilihat dari isi dan konteks kebijakan. Isi kebijakan dalam konten implementasi kebijakan mencakup:¹³

- 1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berada akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.
- 2) jenis manfaat yang dihasilkan
Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan.
- 3) derajat perubahan yang diinginkan
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.
- 4) kedudukan pembuat kebijakan
Kedudukan pembuatan kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang akan lebih tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian di bawahnya.
- 5) siapa pelaksana program
Keputusan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses.
- 6) sumber daya yang dikerahkan
Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumberdaya akan menentukan

¹³Samodra wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994. hal 22-23

pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sedangkan konteks kebijakan yang mempengaruhi.¹⁴

Sedangkan pengukuran isi kebijakan Grindle pada konteks implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat.
- 2) karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

c. Model Daniel Mazmanian Dan Paul A Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier juga mengungkapkan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan Negara adalah mengidentifikasi Variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal. Pada seluruh proses Implementasi Variable-Variable yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang dihadapi atau dikendalikan.
- 2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturisasikan secara tepat implementasinya.
- 3) Pengaruh langsung berbagai Variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

“Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada dua persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan. Menganggap suatu implementasi akan efektif bila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan”.¹⁵

Sehingga model ini disebut model Topdown, lebih lanjut dijelaskan Variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses

Implementasi:

- 1) Kondisi sosial ekonomi dan masyarakat
- 2) Dukungan publik

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid. Hal 25

- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok
- 4) Dukungan pejabat atasan

Implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

d. Model George Edward III

Edward lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan studi Implementasi kebijakan yaitu prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, meliputi empat Variable, yaitu:¹⁶

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi yang dimaksudkan oleh Edwards III bahwa Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali

¹⁶ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 89

oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sumberdaya adalah faktor yang penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetensi pelaksana dan sumberdaya finansial. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (*standart operating procedures*). Prosedur operasi yang standart menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi

yang rumit dan kompleks yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁷

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam Implementasi SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Penulis menggunakan Teori Edward III, alasan Memilih Teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi adalah teori yang sederhana akan tetapi tetap mendalam dalam melihat variable-variable penelitian dan dapat menjawab dari perumusan masalah Penelitian, serta dapat dipahami dengan mudah dari semua kalangan dengan bahasa yang umum, dengan tidak meninggalkan aspek-aspek penting dalam melihat Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi SIPKD dalam Penyusunan RKA di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tahun 2014.

2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem informasi keuangan ditingkat pusat maupun daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi keuangan daerah di setiap tingkatan wilayah

¹⁷ Ibid.

administrasi pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pemerintah Daerah baik kepada tingkatan pemerintahan maupun pada elemen masyarakat sesuai dengan (PP NO 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah atas pemberian Depdagri dan Kemenkeu yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan¹⁸.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada modul Penganggaran pada aplikasi SIPKD. modul Penganggaran adalah Modul aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, dimulai dengan penyiapan KUA dan PPAS. Modul ini memberikan fasilitas penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang akan digunakan dalam proses penyusunan rancangan

¹⁸SIPKD, diambil dari [Id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_informasi_pengelolaan_keuangan_daerah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_informasi_pengelolaan_keuangan_daerah)
Tanggal 10 oktober 2014 jam 18.30 WIB

peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Modul Penganggaran dikembangkan dalam beberapa pengelompokan yang menggambarkan tahapan-tahapan penyusunan, pengesahan dan penetapan APBD, yaitu pembahasan KUA dan PPAS, Penyusunan RKA dan Penyusunan serta pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan penetapan APBD sebagai tahapan terakhir yang kemudian menjadi sumber data untuk penyiapan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di Pusat maupun di Daerah. SIPKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Kemendagri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD di Daerah dengan tujuan:¹⁹

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan keuangan daerah.
- 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan keuangan daerah.
- 3) Membantu kepala Daerah dan Instansi yang terkait dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Membantu menyediakan statistik keuangan daerah.
- 5) Menyajikan informasi keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat.
- 6) Menyediakan informasi keuangan Daerah yang dibutuhkan SIPKD secara Nasional.

¹⁹PP no 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan SIPKD di daerah meliputi:

- 1) Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan dari sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah.
- 2) Penyajian informasi keuangan dalam situs resmi pemerintah daerah.
- 3) Penyediaan informasi keuangan daerah dalam mendukung SIPKD Nasional.²⁰

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan dari sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan anggaran keuangan di Daerah, dalam mendukung hal tersebut pelaksanaan SIPKD didukung oleh situs-situs resmi yang dimiliki setiap instansi Pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ kota.

Pengembangan *E-Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan

²⁰Ibid.

layanan pemerintah secara optimal melalui *e-government*. Dari sisi masyarakat, transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas. Apalagi, akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pelayanan serta biaya yang harus dikeluarkan. Dari sisi pemerintah, penggunaan serta penarikan biaya dari masyarakat dapat diawasi karena keterlibatan pihak lain yang lebih profesional dan kredibel dalam pengelolaan keuangan.²¹

a. Pengertian Sistem

Teknologi yang semakin hari kian berkembang dan menawarkan efisiensi dalam komunikasi akan meningkatkan kinerja maupun kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik. Pemanfaatan teknologi oleh pemerintah dan dibangunnya suatu sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayan yang akan diberikan patut diberikan apresiasi. Suatu sistem informasi yang diterapkan pada birokrasi apabila dioperasikan dengan baik akan menunjang keberhasilan dalam implementasinya. Pengertian Sistem menurut Abdul Kadir:

“Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”.²²

²¹Yohanes, nety herawaty,2013, The Implementation Strategy of Information Technology in Government Sintang West Kalimantan Province, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013

²²Kadir abdul, Pengenalan sistem informasi. Yogyakarta: Andi, 2003. Hal 54

Pengertian sistem di atas jelas bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Jogiyanto, Sistem adalah:

“Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan”²³.

Kedua pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, komponen tersebut saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama. Setiap komponen sistem apabila tidak saling berhubungan dan tidak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan maka komponen tersebut atau kumpulan tersebut bukanlah sistem. Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu Sistem. Menurut jogiyanto, karakteristik suatu sistem adalah sebagai berikut:

- 1) komponen Sistem (*Component*)
- 2) Batasan Sistem (*Boundary*)
- 3) Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)
- 4) Penghubung Sistem
- 5) Masukan Sistem (*Input*)
- 6) Keluaran Sistem (*output*).²⁴

²³Jogiyanto, Sistem teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi, 2003. Hal 34

²⁴Ibid. hal 54

b. Pengertian Data Dan Informasi

Pengetian tentang data dan informasi secara substansi mempunyai perbedaan. Informasi itu mempunyai kandungan makna dan data tidak mempunyai kandungan makna. Pengertian makna disini merupakan hal yang cukup penting. Makna yaitu dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakannya untuk menarik suatu kesimpulan atau bahkan mengambil keputusan. Pengertian data Menurut Abdul Kadir:

“Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai”.²⁵

Pengertian data menurut Abdul Kadir tersebut, jelas bahwa data sebagai deskripsi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sedangkan informasi adalah pengolahan dari data yang sudah dapat dimanfaatkan oleh penggunanya..

c. Pengertian Sistem Informasi

Berdasarkan atas definisi tentang sistem, data dan informasi yang dijelaskan sebelumnya. Sistem Informasi dapat disimpulkan, menurut Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Sistem Informasi, yaitu :

“Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan”.²⁶

²⁵Kadir Abdul,op.cit.hal 29

²⁶Kadir Abdul,op.cit hal 10

Melengkapi pendefinisian Sistem Informasi menurut Abdul kadir, Sistem Informasi juga didefinisikan oleh Jogiyanto, sebagai berikut :

“kumpulan dari komponen yang saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan yang diolah menjadi bentuk sehingga berguna bagi pemakainya”²⁷

Kemajuan ilmu pengetahuan membawa ekses kepada penciptaan teknologi yang semakin canggih. Pengolahan data secara elektronik sangat mendukung terhadap efisiensi dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pengolahan data secara komputerisasi merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi berbasis teknologi.

Unsur teknologi informasi juga tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem. Sinergi antara teknologi dan pelaksanaannya oleh pegawai dapat dilihat dari pelaksanaan prosedur dan proses alur kerja sistem yang meliputi Sub Sistem Input, Sub Sistem proses dan Sub Sistem output. Proses alur kerja sistem ini dimulai saat data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Piranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen organisasi, bagi individu-individu dan organisasi-organisasi di dalam lingkungan organisasi:

- 1) Sub Sistem Input (Data Masukan)

²⁷Jogiyanto,Op.cit.Hal 34-36

Laudon and Laudon menyatakan bahwa input adalah “the data fed into the information system for processing to output”. Maka dapat dikatakan bahwa input merupakan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi agar dapat diproses menjadi output. Biasanya input merupakan kegiatan memasukkan berkas sebagai entry data seperti merekam dan mengedit. Pemakai biasanya meng-entry data langsung ke sistem atau merekam data dari kertas berkas.²⁸

2) Sub Sistem Proses

Ketika persyaratan output dan input telah terbangun, selanjutnya perlu untuk mengakses keterlibatan ujian pemrosesan. Penentuan ini akan menyediakan:

a) Database (Basis Data)

Pengolahan data yang dibutuhkan adalah pengolahan data yang spesifik dengan melewati basis data. Pada gilirannya akan mengacu pada sistem software dan komputer hardware yang paling efektif memperoleh output kepada pengguna yang mereka butuhkan.

(1) Software (perangkat lunak)

Menurut Raymond McLeod perangkat lunak (software) digunakan untuk menggambarkan satu atau beberapa program dan melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan oleh semua pemakai komputer. Karena itu dalam banyak kepustakaan dalam SIM, perangkat lunak disamakan dengan bahasa pemrograman (programming language).²⁹

(2) Hardware (perangkat keras)

Perangkat keras mencakup peranti-peranti fisik yang merupakan elemen dari sistem komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi, seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran.

²⁸ Laudon, Kenneth C dan Laudon, Jane, . Management Information System: Organization and Tecnology in the Network Enterprise. New Jersey: Prentice Hall International Edition.1991.hal.527

²⁹ McLeod Jr. Raymond dan George P, Scell. Sistem Informasi Manajemen. Edisi ke-10. Terj. Ali Akbar Yuniyanto dan Afia,R. Jakarta: Salemba.2008.hal.222

3) Sub Sistem Output

Laudon menyatakan bahwa output adalah "what the information system produces" (apa yang dihasilkan oleh sistem). Output merupakan hasil dari pengolahan data yang telah diproses. Bentuk yang ada pada output mengacu pada bentuk yang dihadirkan kepada pengguna.³⁰

Sedangkan untuk mengetahui bahwa suatu sistem itu merupakan sistem informasi yang baik, dapat dilihat dari informasi yang masuk ke dalam Sistem informasi. Informasi yang dihasilkan harus dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan manajemen. Informasi yang dihasilkan itu harus merupakan informasi yang tepat, dalam hal ini informasi itu harus memenuhi kualitas informasi. Menurut James O'Brien dalam bukunya *Management Information System* terdapat karakteristik untuk mengidentifikasi sistem informasi yang berkualitas, yaitu dapat dilihat dari:³¹

1) Dimensi isi

Isi dari masukan informasi harus memenuhi syarat:

- a) kelengkapan Semua informasi yang dibutuhkan harus disediakan.
- b) Ringkas yang padat Hanya informasi yang dibutuhkan yang seharusnya disediakan.

2) Dimensi Bentuk

Dalam kaitannya dengan dimensi bentuk, informasi di dalam sistem informasi harus memenuhi syarat :

- a) Penyampaian Informasi dapat disampaikan dalam narasi, angka, grafik, atau bentuk lain).
- b) Penyaluran informasi dapat disediakan dalam bentuk tercetak, dokumen-dokumen, layar monitor, atau media lain.

3) *Time Dimension* (Dimensi Waktu)

³⁰ Op.cit.hal.laudon.1991.hal.527

³¹ O'Brien, James. *Management Information Systems; Managing Information Technology in The Internet Worked Enterprise*. New York: McGraw Hill.2001.Hal.14.

Dalam kaitannya dengan dimensi waktu, informasi yang masuk harus memenuhi syarat:

- a) Ketersediaan waktu Informasi harus disediakan kapan pun dibutuhkan.
- b) Ketepatan Waktu Informasi harus terbaru kapanpun dibutuhkan.

Jenjang Waktu Informasi dapat disediakan waktu lampau, sekarang dan periode yang akan datang. Kegiatan pemerintah yang dinamis dan kompleks menjadi menjadi pemicu dalam penerapan sistem informasi dipemerintahan baik pusat maupun daerah. Menurut Anwar, alasan-alasan sekaligus latar belakang diterapkannya sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:³²

- 1) Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta mendominasi di hampir semua bidang kehidupan sehingga mendorong ke arah globalisasi.
- 2) Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas, persaingan perdagangan semakin ketat.
- 3) Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 4) Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu mendorong kegiatan.

Alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh ahli diatas maka sangat wajar jika pemerintah menerapkan pengolahan data secara elektronik. Penerapan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat, akurat dan bernilai yang berguna bagi penerima informasi. Penerapan

³²Anwar, M. Khoirul dan Assianti, Oetojo S, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004. Hal 112-113

pengolahan data secara elektronik tersebut, tidak hanya di tingkat pusat saja melainkan di tingkat daerah juga perlu diterapkan pengolahan data secara elektronik. Selain itu juga kualitas informasi pada sistem Input, proses dan Output sangat menentukan jalannya sistem informasi dalam mencapai tujuannya.

3. Keuangan Daerah

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah, dibedakan menjadi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.³³

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di dalam kegiatan pemerintahan umum maupun dalam bidang pembangunan, serta guna memelihara kehidupan dan kegiatan negara lainnya, diperlukan biaya berupa uang. Demikian juga di Daerah, dimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum selalu meningkat.

Keuangan adalah rangkaian dan prosedur dalam mengelola keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran secara tertib, sah, hemat berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengertian keuangan daerah Menurut Mamesah yaitu:

³³Suparmoko, M. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE. 2000. hal. 52-53.

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah secara sederhana yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai negara serta pihak-pihak lain yang lebih tinggi”.³⁴

Adapun dua unsur penting terkait rumusan Mamesah tersebut, yaitu:

- 1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan sehingga menambah kekayaan daerah.
- 2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.³⁵

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.³⁶

³⁴Mamesah. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995. hal. 16

³⁵Ibid.

³⁶M Shodikin, 2013, Studi Tentang Proses Implementasi Penyusunan Materi Muatan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rka-Skpd) Dibagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, 2014: 2063-2073

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi mempunyai konsekuensi terhadap mekanisme dalam penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dalam suatu negara yang decentralized fungsi alokasi dalam pengelolaan sumber-sumber lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Seiring dengan tuntutan reformasi di berbagai aspek, seperti: pembiayaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi, sistem pemeriksaan, dan sistem manajemen keuangan daerah. Maka diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.³⁷

Berbicara mengenai keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keuangan negara, lebih-lebih dalam negara kesatuan. Negara yang didalamnya terdapat daerah-daerah otonom pada dasarnya merupakan subyek ekonomi selain rumah tangga, perusahaan dan luar negeri. Sebagai subyek ekonomi, negara dan daerah memiliki berbagai kegiatan dan membutuhkan pembiayaan sehingga harus ditopang dengan penerimaan. Adanya penerimaan dan pengeluaran uang oleh negara, munculah istilah keuangan negara sehingga teoritik berkembang ilmu keuangan negara.

“Suparmoko mengartikan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah utamanya mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh-pengaruh

³⁷jurnalBuletin Ekonomi.Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Otonomi Daerah. Vol.1.No.1, April 2003:hal.17-25

dalam perekonomian, terutama pengaruh-pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan kegiatan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, harga, harga distribusi penghasilan yang merata. Peningkatan efisiensi dan penciptaan lapangan kerja. Penerimaan dan pengeluaran daerah dibuat dalam suatu daftar terperinci yang disebut dengan anggaran. Oleh karena itu anggaran adalah suatu daftar pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun”.³⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Widjaja, pada dasarnya sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:³⁹

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain Penerimaan yang sah.

“Sedangkan Menurut Nurlan, sumber-sumber Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.”⁴⁰

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah organisasi kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, meliputi: Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain yang sah.

“Masih menurut Nurlan, Pendapatan Asli daerah sendiri terdiri dari, Pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan

³⁸Suparmoko.op.cit.hal 3

³⁹Widjaja.Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.Jakarta:PT Grafindo Persada.2002.hal.30

⁴⁰Nurlan Darise.Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta:PT Indeks.2006.hal 37

daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi Hibah, dana darurat, dan dana lain yang telah ditetapkan pemerintah.”⁴¹

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan keuangan serta mengelola keuangan sendiri tetapi tetap berdasarkan ketentuan undang-undang atau dalam pengawasan pemerintahan pusat. Sumber keuangan diantaranya yaitu berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka dalam hal ini pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Dengan demikian pemerintah daerah selaku pelaksana dan penanggung jawab keuangan di daerah harus memaksimalkan penerimaan keuangan daerah dengan maksimal untuk mewujudkan keuangan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagaimana disebutkan di muka keuangan daerah terdapat penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran atau belanja pemerintah diperlukan untuk menyediakan barang publik, mengalokasikan barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat selalu berkembang, maka pengeluaran pemerintah juga selalu berkembang. Maka

⁴¹ Ibid.

pengeluaran pemerintah daerah juga dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis yaitu:⁴²

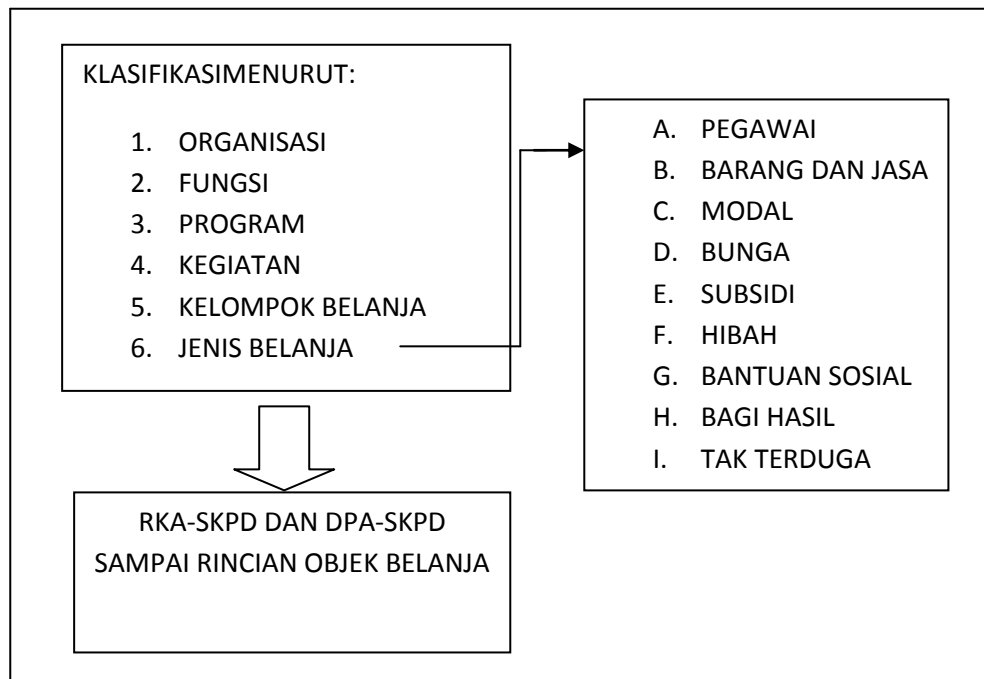
- 1) Pengeluaran yang “self-liuiditing” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/ barang barang yang bersangkutan.
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan yang ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat pengahsilan dan sasaran pajak yanglain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah
- 3) Pengeluaran tidak self-liquidating maupun tidak reprodktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat atau dapat mengakibatkan naiknya pengahsilan nasional
- 4) Pengeluaran yang secara tidak langsung tidak reproduktif dan merupakan pemborosan
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas Umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke Daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun klasifikasi Belanja Daerah Menurut Nurlan, dapat Dilihat Gambar 1.2, sebagai berikut:

⁴²Suparmoko.op.cit.hal.48

Gambar1.2 Klasifikasi Belanja APBD



(sumber:Nurlan Darise.2006:149)⁴³

Dalam APBD, klasifikasi Belanja daerah sampai dengan jenis belanja sedangkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan Rincian objek Belanja. Sedangkan jenis Belanja Terdiri dari Belanja Pegawai sampai dengan Belanja tak terduga.

4. Rencana Kerja Dan Anggaran

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah, tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu Perencanaan. Sebagai salah satu fungsi organik manajemen maka selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya

⁴³Nurlan Darise.Op.cit.Hal 149

tujuan serta berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya, baik untuk daerah tingkat satu (I) atau pun daerah tingkat dua (II).

Menurut Siagian, dalam bukunya *filsafat administrasi* mengemukakan bahwa:

“planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses penilaian dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan”.⁴⁴

Sedang Mademan Sosromidjojo merumuskan perencanaan ini sebagai penentuan di muka mengenai jalanya suatu kegiatan.⁴⁵

Demikian pula dengan Achmad Fauzi dan Iskandar, mengutip pendapat The Liang Gie, bahwa:

“perencanaan adalah pola perbuatan menganggarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakan”.⁴⁶

Dari ketiga rumusan tersebut diatas secara garis besar memberi gambaran bahwa perencanaan adalah suatu perumusan awal tentang perkiraan sumber daya dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan tertentu. Penganggaran pada dasarnya adalah proses menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja dalam kurun waktu tertentu, Rencana Kegiatan dan Anggaran adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang sangat penting dalam mempengaruhi penyusunan anggaran.

⁴⁴S.P.Siagian.Filsafat Administrasi.Jakarta:Gunung Agung.1980hal 3

⁴⁵Mademan Sosromidjojo.Administrasi dan Efisiensi Bekerja.Yogyakarta:BPA UGM. 1963.Hal 18

⁴⁶Fauzi Achmad dan iskandar. Cara Membaca APBD Malang.Malang:LP Universitas Brawijaya.1982.hal.117.

Perencanaan dan pengelolaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan bagi instansi pemerintah, tanpa anggaran tidak dapat menjalankan pelayanan, dan melaksanakan operasionalisasi secara menyeluruh. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran digunakan oleh kepala instansi sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikannya kepada tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi.

Peranan perencanaan dan penyusunan anggaran sangat penting dan dilakukan dengan matang dengan membentuk Tim penyusun anggaran dengan mengacu pada draft, Renstra maupun standar-standar yang ada. Sebaliknya, tidak jarang kita melihat dalam penyusunan dan perencanaan anggaran tidak dimulai dari bawah (Bottom up), tidak dapat memilah dan memprioritaskan kegiatan, penempatan anggaran yang tidak semestinya, menyusun anggaran hanya berpatokan pada rutinitas saja sehingga dalam pelaksanaannya dana yang disediakan dalam kegiatan tidak mencukupi atau dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak berdasarkan Tupoksi yang ada yang mengakibatkan

pertanggungjawaban anggaran gagal yang lebih buruk lagi berdampak pada pelayanan yang tidak optimal.⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, Sebelum sampai ke tahap penyusunan APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebagai bentuk tahapan Perencanaan yang harus dilakukan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Pengertian RKA-SKPD menurut Nurlan, yaitu sebagai berikut:

“RKA adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan.”⁴⁸

Didalam RKA sendiri memuat informasi tentang urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Standar Biaya, Prestasi Kerja, yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Selain itu RKA juga memuat belanja tidak langsung khusus belanja pegawai dan seluruh belanja langsung. Dengan demikian penyusunan RKA, dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan perencanaan keuangan sebelumnya yang mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun pendekatan Penyusunan RKA menurut Nurlan, sebagai berikut:

⁴⁷Agus, Salim, Januari 2013, Budget Mechanism Analysis As A Financial Control Device, A Case Study Of Palu Anutapura General Hospital In The Year 2011, Jurnal AKK, Vol 2 No 1, Januari 2013, hal 8-17.

⁴⁸Nurlan Darise.op.cit.hal 154

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dimana pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perikraan maju.
- 2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.⁴⁹

Secara garis besar proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai bulan Januari sampai pada bulan Agustus dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan pada tahap berikutnya. Untuk itu pada tahap awal perencanaan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap kesinkronan antara dokumen RKA dengan dokumen KUA dan PPAS.

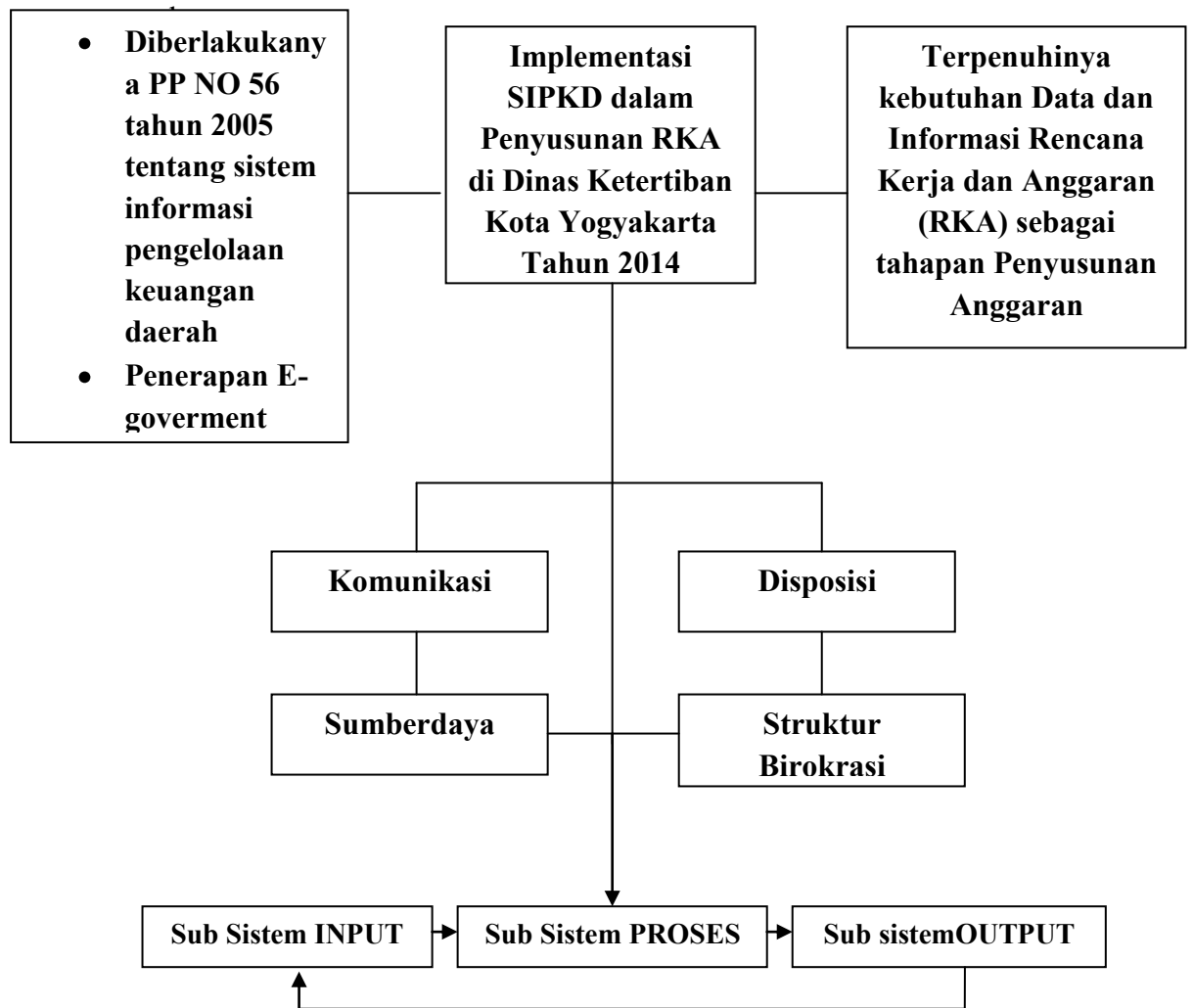
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD, yang secara substansi harus sesuai dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan sudah disetujui target kinerja dan pagu anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKA-SKPD inilah yang disebut sebagai dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan alokasi anggaran dan target

⁴⁹Ibid.hal.155

kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan akhirnya dalam perda APBD.⁵⁰

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



Sehubungan dengan diberlakukannya E-government dan Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang mengatur tentang

⁵⁰Nurhalimah.2013.Jurnal Akuntansi ISSN Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh Volume 2, No.1, Februari 2013

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah diberikan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari beberapa modul yaitu perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban. Dalam modul penganggaran terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk penyusunan RKA, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang Mempengaruhi Implementasi SIPKD Yang Terdiri Dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut secara langsung mempengaruhi aparatur dalam Sub Sistem Input, Sub Sistem Proses dan Sub Sistem Output dalam rangka pemenuhan data Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 sebagai tahapan penyusunan anggaran di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

G. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi Konsepsional adalah unsur yang dipakai peneliti untuk menggambarkan fenomena alami. Definisi Konsepsional merupakan suatu pengertian segala yang menjadi pokok perhatian, yang dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Batas pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu pelaksanaan proses dari kebijakan yang telah diformulasikan sebelumnya. Implementasi kebijakan dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan tindakan-tindakan baik dari individu atau kelompok pemerintah yang bertujuan untuk mencapai target keputusan kebijakan yang dirumuskan sebelumnya.

b. SIPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang diberikan oleh Kemendagri dan Kemenkeu kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat dan masyarakat. SIPKD merupakan aplikasi sistem informasi keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pelaksanaannya, dengan pelaksanaan SIPKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

c. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki daerah baik dalam bentuk barang atau uang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien akan memaksimalkan jalanya roda pemerintahan dan pembangunan yang menyeluruh, keuangan daerah memiliki cakupan, melakukan pemungutan pajak serta retribusi daerah,

kewajiban daerah untuk membayar hutang ke pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan seluruh urusan mengenai kekayaan yang dimiliki daerah.

d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, Rencana Kegiatan dan Anggaran juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan bagi SKPD, organisasi, standar biaya, prestasi yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Untuk menjawab dari perumusan masalah dan untuk menilai Implementasi SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, peneliti menggunakan Indikator-indikator sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses implementasi SIPKD dalam Penyusunan RKA peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Sub Sistem Input

- 1) Dimensi isi dan bentuk informasi dalam pelaksanaan SIPKD dalam penyusunan RKA
- 2) Dimensi waktu dalam pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan RKA.

b. Sub Sistem Proses

- 1) Data Base dalam pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan RKA
- 2) Hard ware (perangkat keras) dalam Pelaksanan SIPKD dalam Penyusunan RKA
- 3) Soft ware (perangkat Lunak) dalam pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan RKA

c. Sub Sistem Output

- 1) Dimensi isi dan Bentuk informasi dalam pelaksanaan SIPKD dalam penyusunan RKA
 - 2) Dimensi waktu dalam pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan RKA
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIPKD dalam penyusunan RKA peneliti menggunakan indikator menurut Edward III, sebagai berikut.⁵¹

a. Komunikasi

- 1) Penyampaian informasi pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

⁵¹Subarsono.op.cithal.99

b. Sumber Daya

- 1) Sumber Daya Manusia pada Implementasi SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- 2) Sumberdaya Financial dalam Implementasi SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

c. Disposisi

- 1) Komitmen dari pelaksana Implementasi SIPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- 2) Kejujuran dalam Implementasi SIPKD dalam Penyusunan RKA.
- 3) Sifat demokratis dari pelaksana dalam Implementasi SIPKD dalam penyusunan RKA.

d. Struktur Birokrasi

- 1) Standar operasional Prosedur (SOP) organisasi dalam Implementasi SIPKD dalam penyusunan RKA.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alami, maka sifatnya naturalistik serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun kelapangan. Penelitian ini menggunakan kualitatif karena tidak terfokus dalam menggunakan rumus dan angka-angka, melainkan menghasilkan data penelitian

deskriptif yang berupa kata-kata penulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Bagaimana dan faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Dipilihnya studi di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta karena keingintahuan peneliti Tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Penyusunan RKA. Yang menjadi pertimbangan peneliti adalah dengan sudah dijalankannya SIPKD di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta sejak akhir 2008. sehingga dapat mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

3. Unit Analisa

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit-unitnya adalah:

- a. Sub Bagian Administrasi Data dan pelaporan di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- b. Sekretariat Dinas ketertiban Kota yogyakarta.
- c. Bagian TIT Kota Yogyakarta

d. Admin Pusat SIPKD (DPDPK)

4. Jenis Data

a. Primer

Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait denganya) yang peneliti peroleh dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian adapun data Primer dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Sub sistem Input	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat	Wawancara
Sub Sistem Proses	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat Bagian TIT Kota Yogyakarta	Wawancara
Sub Sistem Output	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat	Wawancara
Komunikasi	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat Admin Pusat SIPKD (DPDPK)	Wawancara
Sumber Daya	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat Bagian TIT Kota Yogyakarta	Wawancara
Disposisi	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat	Wawancara
Struktur Birokrasi	SUB BAGIAN Administrasi Data dan Pelaporan Sekretariat.	Wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua informasi yang diperoleh peneliti tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian, Data Sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 1.2 Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi
SK Walikota Yogyakarta tentang Penyusunan RKA pada Aplikasi SIPKD	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi
Cap Formulir SKPD	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi
Profil Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi
SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas ketertiban Kota Yogyakarta	DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah terkait dengan data empiris penulis yang meliputi, sejak kapan SIPKD dilaksanakan, Tujuan Dilaksanakannya SIPKD, dan kendala-

kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan SIPKD. Dengan melakukan pengamatan dengan seksama terhadap objek penelitian.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang berdasarkan dari Dokumentasi dokumen yang telah dipublikasikan meliputi, dokumen RKA, SK Walikota tentang Penyusunan RKA di aplikasi SIPKD, KUA, PPAS, Cap Formulir SKPD.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator teori kepada Bagian Administrasi data dan Pelaporan di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bagian TIT Kota Yogyakarta, dan Admin Pusat SIPKD di DPDPK Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data-data terkait penilaian Implementasi SIPKD dalam Penyusunan RKA yang berupa Sub Sistem Input, Sub Sistem proses, dan Sub sistem Output serta faktor yang mempengaruhi Implementasi yaitu berupa Komunikasi, Sumber Daya Manusia yang dikerahkan, Komitmen dari pelaksana, dan bagaimana Struktur Birokrasi pelaksanaan SIPKD dalam Penyusunan RKA.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Oleh karena itu model penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Proses analisis Data Kualitatif dapat dijelaskan, sebagai berikut:⁵²

- a. Pengumpulan Data, yaitu data penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan metode yang telah ditentukan.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh lapangan studi.
- c. Penyajian Data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁵²Salim, agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: LAP IP UMY. 2006. hal. hal. 20

- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari proses pengumpulan data peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga memperoleh kesimpulan yang valid.